

**PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRABOWO
PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 WAY KANAN**

**(Studi Pada Masyarakat Desa Curup Patah Kecamatan
Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**



Program Studi: PPI (Pemikiran Politik Islam)

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRABOWO
PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 WAY KANAN**

**(Studi Pada Masyarakat Desa Curup Patah Kecamatan
Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

**UNILA
NPM. 1531040072**



Program Studi: PPI (Pemikiran Politik Islam)

Pembimbing I : Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.A

Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRABOWO PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 WAY KANAN

**(Studi di Desa Curup Patah Kecamatan
Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**

Oleh : UNILA

Pesta Demokrasi yang berlangsung pada 17 April 2019 lalu, dalam hal ini terkait pemilihan presiden, secara tidak langsung menimbulkan persaingan gagasan dan pemasaran politik antara paslon. Penyelenggaraan pemilu juga tidak terlepas dari peran komisi pemilihan umum (KPU) selaku pengadil dalam berjalannya pesta demokrasi yang adil demi terselenggaranya pemilu yang demokratis dengan parameter yang berdasarkan undang-undang. Janji-janji serta propaganda politik yang di pasarkan di tengah masyarakat secara tidak langsung menimbulkan kecenderungan memilih dalam masyarakat bawah, hal ini karna masyarakat sebagai target utama pemasaran para elit politik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku pemilih prabowo subianto di desa curup patah kabupaten waykanan. Penelitian dilakukan dengan melihat preferensi politik masyarakat desa curup patah di kabupaten waykanan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu perilaku memilih yang didasarkan pada tiga aspek yakni sosiologis, psikologis dan rasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe studi kasus, teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang dianalisis dengan mengacu pada teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi politik pemilih Prabowo Subianto di desa curup patah waykanan adalah pada personality yang dimiliki Prabowo Subianto, gaya kepemimpinan, rekam jejak serta program kerja yang di tawarkan Parabowo Subianto.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UNILA

NPM : 1531040072

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Prabowo Pada Pemilu Presiden Thn 2019 Studi Kasus Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way kanan)" merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam Footnote atau Daftar Pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

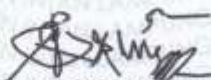
Judul Skripsi : PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRABOWO PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)

Nama : UNILA
NPM : 1531040072
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama


MENYETUJUI

Untuk di Sidang Munaqasayah dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasayah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Arsyad Sobby Kusuma, M.Ag
NIP. 195808231993031001

Pembimbing II


Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Mengetahui
Ketua Jurusan


Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 19780130201101204



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PRABOWO PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)** Disusun oleh **UNILA NPM: 1531040072** Jurusan: Pemikiran Politik Islam Telah diujikan pada hari/tanggal: **Senin, tanggal 12 Oktober 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag (.....)

Sekretaris Sidang : Angga Natalia, M.I.P. (.....)

Penguji Utama : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. Arsyad Sobby Kusuma, M.Ag. (.....)

Penguji II : Abd. Qohar, M.Si. (.....)



Mengetahui
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. M. Afif Anshori, M.Ag.
NIP. 196003131989031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’ : 59)”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak M. Supawi dan Ibu Nun Sanah yang begitu mencintaiku dan menyayangiku segenap jiwa dan raga, nyawa, tetesan keringat dan air mata yang selalu mendidik dari buaian sampai saat ini dengan keikhlasan yang sangat tulus dan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, tanpa balas jasa.
2. Kepada keluarga tercinta, kaka Hariyanto, Mega Wati Silvia, Raya Fitri Yani, Hermasyah Putra, Ramayana, Tut Wuri Handayani. Yang telah memberikan doa serta dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing I Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.ag. Serta Pembimbing II Abdul Qohar, M.Si yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan untuk skripsi penulis.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menuntut ilmu Pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga yang tidak penulis katakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Unila, merupakan anak ke-7 dari 7 bersaudara, dilahirkan di Curup Patah kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten way kanan pada tanggal 01 juli 1997. dari pasangan Bapak M. Supawi dan Ibu Nun Sanah.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Curup Patah yang selesai pada tahun 2009, dan kemudian penulis melanjutkan sekolah di MTSN 2 Padang Ratu lulus ditahun

2012, selanjutnya di MAN 1 kotabumi lulus ditahun 2015. dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama jurusan pemikiran politik islam di mulai pada TA.2015/2020.

Demikian riwayat hidup penulis yang pernah penulis jalani selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2020

Penulis

UNILA

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini, Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.si, selaku Ketua Jurusan Pemikiran PolitikIslam.
4. Bapak Dr. H. Arsyad Soby Kesuma, Lc, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan ketelitian dalam membimbing penulisan kepada penulis sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam serta seluruh dewan pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung ,dan kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama.
7. kawan-kawan seperjuangan Yunie Risma Riyantie, Ayu Meta Sari, Nopi Mini Sari, Nadia Intan Permata Sari, Veiga Meidian Pratiwi. yang telah memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini terutama jurusan pemikiran politik islam.
8. Bibik- bibik kosan Sri Wahyuni,Yunie Risma Riyantie,Yeyen Aryanti, Yeni Irmayani,Wulan Septi Riana,Yanti Agustina,Noni Puspita Sari. yang selalu memberi semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi.

Semoga atas bantuan dan jerih payah dari semua pihak menjadi ibadah disisi Allah SWT. Amin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II PREFERENSI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

A. Preferensi Masyarakat.....	11
1. Pengertian Preferensi	11
2. Preferensi Dan Rasionalitas Dalam Politik.....	11
3. Partisipasi Politik	19
4. Prilaku Pemilih	19
5. Jenis Dan Tipe Pemilih.....	25
B. Pemilihan Umum	30
1. Pengertian Pemilihan Umum	30
2. Fungsi Dan Tujuan Pemilihan Umum.....	31
3. Asas Pemilihan Umum.....	34
4. Tahap-Tahap Pelaksanaan Umum.....	35
5. Aturan-Aturan Dalam Pelaksanaan Umum.....	36
6. Penyelenggara Pemilihan Umum	38
C. Tinjauan Pustaka	41

BAB III PEMILIHAN PRESIDEN DESA CURUP PATAH KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

A. Gambaran Umum Desa Curup Patah Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan.....	43
B. Data Perolehan Pemungutan Suara di Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	50
C. Profil Kandidat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024	51
D. Visi Misi Kandidat Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019	53
E. Keadaan Sosial Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	53

BAB IV ANALISIS PREFERENSI MASYARAKAT MEMILIH PRABOWO PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

A. Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Prabowo Pada Pemilu Presiden Tahun 2019	66
1. Preferensi Negatif.....	70
2. Preferensi Positif	71
B. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Prabowo Pada Pemilu Presiden Tahun 2019	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun penegasan judul dalam penelitian berperan untuk memperjelas arah penelitian pada pokoknya, tidak melebar kemana-kemana sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Judul penelitian ini yaitu Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Prabowo Pada pemilu Presiden Tahun 2019 (Studi Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan). Berikut penegasan judul penelitian ini:

1. Preferensi Masyarakat

Preferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan, kecenderungan, minat atau keunikan. Adapun menurut para ahli Porteus ialah bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu atau Masyarakat dan komponen-komponen tersebut adalah Persepsi, sikap, nilai dalam mengambil keputusan dalam menentukan pilihannya tersebut.

Secara etimologi Masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif

di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Untuk pertama kali pada tahun 2019 pemilihan Presiden di adakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif.

Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.¹ Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen²

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Penulis tertarik untuk mengangkat tentang Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Prabowo pada pemilu 2019 yang dilakukan dalam pemilihan pemilu Presiden Gunung Labuhan. Dalam alasan

¹ Undang- undang Dasar 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 414.

penelitian memilih Prabowo karena Prabowo itu sendiri memiliki Visi dan Misi yang sangat baik dan Prabowo ingin adanya suatu perubahan bagi Indonesia terutama bagi masyarakat kecil seperti pedagang dan petani yang semakin jauh dari kata kemakmuran.

- b. Karena beberapa preferensi yang timbul dikalangan masyarakat terhadap kemenangan-kemenangan PILPRES, maka penulis ingin mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya preferensi dikalangan masyarakat di desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan mengenai preferensi masyarakat dalam memilih prabowo pada pemilu presiden tahun 2019 way kanan karena berhubungan dengan suatu rancangan studi yang peneliti tangkap yakni Pemikiran Politik Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan salah satu ciri nilai-nilai atau etika politik Islam, yang identik dengan musyawarah. Musyawarah dalam hal ini merupakan pengambilan keputusan partai dalam penentuan kandidat pada Pilpres 2014 sesuai dalam QS. Al-Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Surat Ali-Imron Ayat 159).

Ayat QS. Al-Imran ayat 159 menunjukkan bahwa betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan manusia; dalam bermasyarakat, keluarga, dan dalam kehidupan politik kenegaraan.

Negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk musyawarah yang nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.³

Pelaksanaan pemilu dalam sistem demokrasi menjadi sebuah indikator kesuksesan sistem politik. Hal ini dibuktikan dengan besarnya partisipasi masyarakat untuk mengikutinya. Dua kali pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang dilakukan kembali mempertemukan dua calon presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Perbedaannya pada pemilu 2014 Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa. Sedangkan pada pemilu 2019 Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Ma'ruf Amin merupakan seorang ulama besar dan pernah menjabat sebagai ketua MUI Indonesia, sementara Sandiaga

³ Gaffar Janedjri M, "Politik Hukum Pemilu", (Jakarta: Konstitusi Press, 2012) h. vii

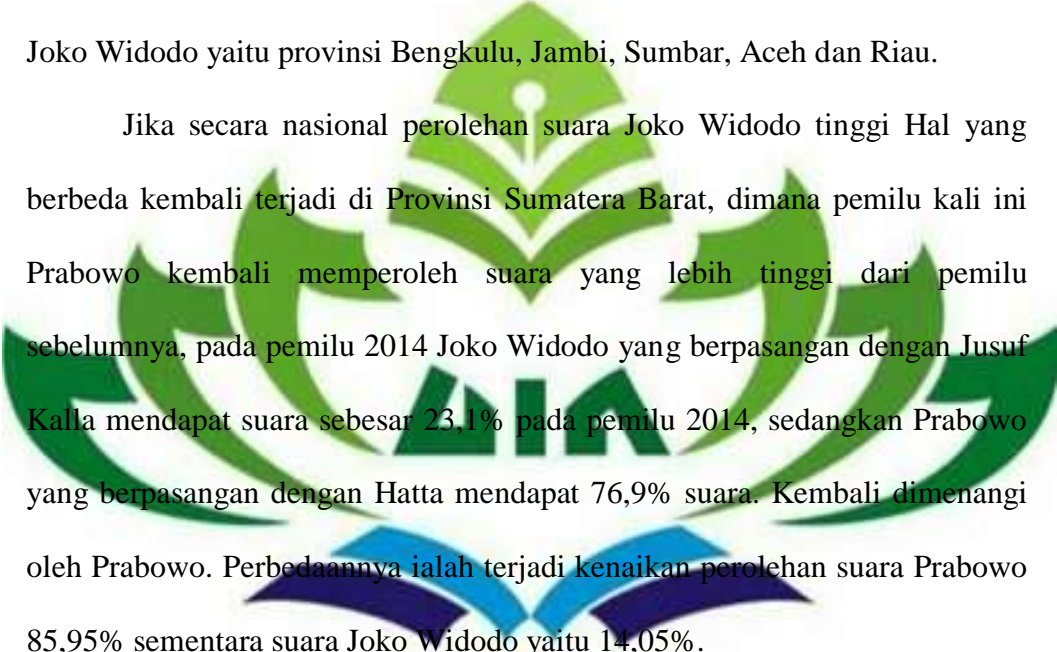
Uno berasal dari birokrat dan mampu mewakili suara kaum milenial Indonesia.

Keberadaan partai pengusung pendukung paslonpun memiliki peran yang sangat penting . Jika dilihat dari partai pengusung kedua capres relatif sama. Pada pemilu 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh 4 partai koalisi yaitu Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI. Sedangkan Prabowo-Hatta diusung oleh partai Gerindra yang berkoalisi dengan PKS, PAN, PPP, PBB dan Golkar. Sementara pada pemilu 2019 terjadi pergeseran koalisi masing-masing kubu. Partai Golkar, PPP dan PBB berpindah ke kubu Joko Widodo-Amin, Demokrat yang semula tidak berkoalisi dengan kubu manapun kemudian bergabung untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Isu yang dibangun pada pemilu 2019 pun relatif sama dengan pemilu 2014. Pembahasan yang menarik untuk kedua pasangan calon adalah isu negatif mengenai SARA yang ditujukan pada Joko Widodo dan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo. Pada sisi positif isu yang berkembang mengenai kinerja Joko Widodo adalah keberhasilannya dalam menekan inflansi dari 4% menjadi 3%, pembangunan infrastruktur dan cawapres yang berasal dari ulama. Sementara kelompok pendukung Prabowo berusaha menjangkau kelompok milenial dan para *emak-emak* yang didukung oleh para ulama.

Hasilnya tidak jauh berbeda dari *persentase* suara pada pemilu sebelumnya, tahun 2014 Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla

mendapat 53,15 % suara dan unggul atas Prabowo-Hatta yang mendapat 46,85% suara. Sementara pada pemilu 2019 persentase suara Jokowi-Ma'ruf sedikit mengalami kenaikan menjadi 55,5% suara dibandingkan Prabowo-Sandi yang hanya mendapat 44,5% suara. Sebaran perolehan suara Prabowo kali ini berbeda pemilu sebelumnya, dimana suara tertinggi hanya berada pada provinsi Sumatera Barat dan Madura. Namun, pada pemilu 2019 persentase sebaran suara Prabowo untuk Pulau Sumatea relatif menyamai Joko Widodo yaitu provinsi Bengkulu, Jambi, Sumbar, Aceh dan Riau.



Jika secara nasional perolehan suara Joko Widodo tinggi Hal yang berbeda kembali terjadi di Provinsi Sumatera Barat, dimana pemilu kali ini Prabowo kembali memperoleh suara yang lebih tinggi dari pemilu sebelumnya, pada pemilu 2014 Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat suara sebesar 23,1% pada pemilu 2014, sedangkan Prabowo yang berpasangan dengan Hatta mendapat 76,9% suara. Kembali dimenangi oleh Prabowo. Perbedaananya ialah terjadi kenaikan perolehan suara Prabowo 85,95% sementara suara Joko Widodo yaitu 14,05%.

Perilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Dan perilaku pemilih yang dimaksud disini yaitu: pelaksanaan kampanye, kepartaian dan juga proses voting atau pemberian suara. Di sini kampanye telah mengalami pergeseran paradigma. Paradigma lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan untuk meyakinkan pemilih telah pudar dan diganti dengan paradigma baru bahwa kampanye merupakan komunikasi politik dan

pendidikan politik. Bergabung dengan partai politik juga merupakan bagian atau bentuk dari perilaku pemilih. Karena partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Sedangkan Menurut Teori Porteus Preferensi adalah bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu atau Masyarakat dan komponen-komponen tersebut adalah Persepsi, sikap, nilai, kecenderungan dan kepuasan. Komponen tersebut saling memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Setiap individu menentukannya dalam memilih.⁴

Dari masing-masing calon ini telah mewarnai perjalanan kompetisi politik tidak langsung di kabupaten Way Kanan dengan berbagai macam kegiatan yang bersipat pemenangan yang didasari dengan strategi dan marketing politik masing-masing. Namun kompetisi politik yang telah berlangsung pada akhir perjalanan kompetisi ini dengan perolehan suara Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara sebanyak 128 suara, H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sebanyak 571 suara. Melihat dari perolehan suara dari masing-masing calon diatas, maka kompetisi politik khususnya di desa Curup Patah kecamatan Gunung Labuhan dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tentunya pemenangan ini karena adanya dampak dari tim-tim pemenangan yang selalu bekerja keras untuk memenangkan jagoannya

⁴Jalaluddin Rahmad, *psikologi komunikasi*, Edisi, Revolusi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 51.

dengan menggunakan berbagai macam strategi dan marketing politiknya, sehingga yang mereka perjuangkan membuahkan keberhasilan yang sangat memuaskan yaitu menang dalam sebuah kompetisi politik.

Adapun tim pemenangan yang berdomisili dari desa Curup Patah yang salah satu bernama madi, dari tim ini penulis banyak mendapatkan informasi yang biasa mendukung untuk memperlengkap kajian skripsi ini. namun pesta demokrasi ini sejatinya adalah milik rakyat pada umumnya karena rakyat atau masyarakat adalah tolak ukur untuk suksesnya pesta demokrasi tersebut . masyarakat atau rakyat mempunyai hak pilih dan memilih calon pemimpin yang mereka sukai dan mereka kehendaki, hak masyarakat untuk memilih calon pemimpin menurut hati dan nuraninya adalah suatu kebebasan yang dilindungi oleh perundang-undangan, jadi tidak ada satu pun orang atau kaum politik yang bias memaksakan dan merubah kehendaknya masyarakat yang sudah menentukan pilihannya.

Berangkat dari uraian-uraian diatas penulis berminat untuk meneliti permasalahan yang ada di desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan terkait marketing politik dari tim pemenangan yang menghalalkan berbagai cara yang menimbulkan berbagai preferensi dikalangan masyarakat terkait pelaksanaan pilpres2019 lalu yang berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada BAB II tentang asas, prinsip dan tujuan pada pasal 2 yaitu Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan pilpres 2019 lalu untuk terselenggaranya pesta demokrasi terbesar Di Indonesia melalui masyarakat yang menjadi objek sasaran dari peserta pemilu serta hal ini karena masyarakat ikut andil dalam mengamati serta merasakan langsung pelaksanaan pilpres 2019 lalu.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah paparkan di atas memberikan beberapa asumsi permasalahan yang ada terkait pemilihan Presiden maka fokus penelitian ini adalah Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Prabowo Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Preferensi masyarakat di Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Terhadap pemilihan prabowo pada pemilu presiden Tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan preferensi masyarakat desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dalam memilih prabowo pada pilpres 2019?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui preferensi masyarakat desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan terhadap pemilihan Prabowo pada pemilu presiden tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menimbulkan preferensi Masyarakat Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan.

G. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu politik.
- b. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka khusus dalam memahami tentang kampanye dalam pemilu.

2. Praktis.

- a. Memberikan sumbangan khususnya bagi mahasiswa sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana pentingnya kampanye dalam sebuah pemilihan umum.
- b. Memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilu 2019.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari judul penelitian ini tergolong dalam lapangan (field research), Menurut Sugino penelitian langsung merupakan penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁵

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan diantara yang ada dan fenomena tertentu.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁷ Data primer dari penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari setiap anggota ketua panitia tps di Desa Curup Patah dikecamatan Gunung Labuhan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah terjadi, biasanya telah tersusun dalam berbentuk dokumen. Data sekunder biasanya

⁵Kalean, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

⁶*Ibid.*, h. 32.

⁷Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, Edisi Revisi, 2015), h. 137.

diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian.⁸

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁹ Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan observasi langsung masing-masing ketua tps didesa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

b. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu bertanya jawab secara lisan, antar dua orang atau lebih secara langsung.¹⁰ Wawancara dilakukan kepada informan, pada penelitian ini yang menjadi informan adalah masing-masing ketua panitia TPS di Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan serta warga curup patah yang memilih prabowo subianto.

⁸ *Ibid.*, h.40.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori Dan Praktek), (Jakarta: pt adi mahsatya, 2006) cetakan kelima, h. 63

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 57

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah menggali data mengenai hal-hal atau variable yang di bahas, berupa catatan, buku, surat kabar, internet, skripsi, proposal, maupun jurnal dan sebagainya.¹¹ Data ini lebih dominan kepada data sekunder. Demi untuk mempermudah pengamatan terhadap kejadian yang komplek peneliti diperkenankan memakai alat yang dapat membantu berupa kamera, video, dan audio recorder.

4. Analisis Data

Ketika semua data sudah terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang di tentukan, lalu tahap berikutnya ialah mengumpulkan dan mengolah data yang terkumpul melalui mengklarifikasi semua jawaban guna dianalisa. Data yang didapat lapangan dianalisa dengan memakai metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ialah cara yang dilakukan secara berkelanjutan dan *continue*. Data yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata bukan berbentuk susunan angka, analisis tersusun dari tiga jalur kegiatan yang dilaksanakan dengan bersama-sama yakni: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹²

¹¹ Sumandi Surabaya, *Metode Penelitian*, (Jakarta raja grafindo persada, 2012) h. 161

¹² Beni Kurniawan , *Metode Penelitian*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012) h. 69

BAB II

PREFERENSI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

A. Preferensi Dalam Politik

1. Pengertian Preferensi

Menurut Porteus mendefinisikan preferensi adalah bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah persepsi, nilai, kecenderungan, dan kepuasan. Komponen tersebut saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan.¹³

Preferensi itu sendiri proses setiap individu dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya, yang dapat dibentuk melalui pola pikir individu yang didasari dari pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun. Dikaitkan dalam preferensi terhadap pemilihan, pengalaman yang diperoleh akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat tentu memiliki adil yang cukup besar dalam menentukan pemimpin yang tepat untuk negaranya, serta untuk kepercayaan turun temurun lebih dikaitkan dengan masyarakat dan lingkungannya yang ada disekitarnya.¹⁴

2. Preferensi Dan Rasionalisasi Politik

Preferensi politik adalah pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Tindakan politik yang diwujudkan dari nilai-nilai politik yang diyakini seseorang ini menjadi faktor yang sangat menentukan untuk

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono. *Pengantar Psikologi*, Jakarta, Bulans Bintang, 1976,h. 39

¹⁴ Kartini Kartono, *Pskologi Umum*, Bandung,Alumni, 1984.h.77

mengarahkan agar merespons situasi (politik) yang dihadapinya. Bentuk tindakan politik yang diberikan seseorang ini tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Tindakan politik ini bergantung pada nilai-nilai apa yang menonjol dalam dirinya pada saat itu. Tidak jarang pula nilai-nilai yang diyakini itu diwujudkan dalam bentuk motivasi dan minatnya terhadap politik.

Karakteristik geografi atau lingkungan di mana individu tinggal dapat pula mempengaruhi aktualisasi nilai-nilai politik seseorang. Namun dengan adanya mekanisme penya-ringan (filterisasi) yang berbentuk keyakinan seperti nilai ideologi, agama, kultur, ekonomi dan lain sebagainya menghilangkan pengaruh geografi dan lingkungan politiknya. Sebaliknya karakteristik geografi dan lingkungan tadi dapat pula memperkuat kecenderungan pilihan individu.

Jika pragmatisme dalam politik ada kaitannya dengan rasionalisasi pilihan politik seseorang, apakah pemilih yang berasal dari kelompok kedua masyarakat miskin kota di atas tadi adalah pemilih yang rasional? Lalu bagaimana dengan orang yang mempertahankan pilihannya berdasarkan keyakinannya, apakah mereka tidak rasional? Tentunya jawaban terhadap pertanyaan ini perlu penjelasan yang mendalam. Salah satu model keputusan dalam perilaku memilih (*voting behavior*) ini adalah model rasional. Model ini memiliki asumsi bahwa seorang pemilih berusaha memaksimalkan manfaat yang diharapkannya dari kesempatan dalam persaingan pilihan. Model pilihan rasional ini memandang ke depan

berkaitan dengan implikasi dari pilihan yang dibuatnya. Pemilih dari model ini mengandalkan kepada orientasi informasi yang diperolehnya saat itu. Biasanya pemilih dalam model ini tidak lagi mempertimbangkan masa lalu partai politik tersebut atau masa lalu pilihannya.¹⁵

Dengan memahami keadaan yang terjadi, pemilih dengan model rasional ini menentukan keuntungan yang ingin diperolehnya dalam sebuah pemilihan umum. Keuntungan tersebut diwujudkan dengan cara menghitung peluang dan kemungkinan sehingga dapat dicapai. Setelah perhitungan terhadap peluang dan kemungkinan itu diperolehnya, barulah si pemilih menentukan keputusannya (*vote*). Model ini terlihat sangat pragmatis, tidak hanya mengandalkan aspek ideologi semata dan latar belakang pilihannya terdahulu. Biasanya individu juga memperhatikan dinamika politik yang terjadi saat itu dengan mengaitkannya dengan keadaan diri dan lingkungannya. Dengan demikian, rasionalisasi yang dilakukan pemilih lebih merujuk kepada keuntungan yang akan didapatkannya, kalau memilih suatu partai politik.

Rasionalisasi pilihan politik adalah suatu proses penggunaan pikiran oleh individu untuk memikirkan, menimbang dan memutuskan suatu tindakan politik yang sesuai dengan realita politik yang berlangsung dan mampu memperkirakan kemanfaatan keputusan yang dibuat dalam jangka pendek ataupun panjang.¹⁶ Rasionalisasi politik jelas berhubungan

¹⁵ Himmelweit, H.T., Humpreys, P., Jaeger, M., Katz, M. 1981. *How Voters Decide: a Longitudinal Study of Political Attitudes and Voting Extending over Fifteen Years*. London: Academic Press.

¹⁶ Goddin, Robert E. 1976. *The Politics of Rational Man*. Great Britain: The Pitmat Press .

dengan kemampuan individu meningkatkan kemanfaatan yang diperolehnya setelah melakukan tindakan politik. Ini berarti ada proses olah pikir berdasarkan realita politik yang dihadapi seseorang serta mampu memperkirakan konsekuensi dari pilihannya itu. Sebaliknya seseorang yang hanya mengandalkan ikatan emosional semata dalam memilih partai politik tidaklah mampu menjangka keuntungan yang diperolehnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Realita dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berpendidikan rendah, tidak memungkinkan masyarakat untuk berperilaku rasional dalam memilih partai politik. Keterbatasan pendidikan dan informasi politik yang dimilikinya berakibat pada pilihan politiknya. Di negara-negara sedang membangun seperti Indonesia, tingkat pendidikan seseorang merupakan simbol status sosialnya dalam masyarakat. Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial ini, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik seseorang adalah faktor kelas sosial (status ekonomi) terutamanya di negara-negara industri.

Di Eropa kelompok penghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung memberikan suara pada Partai Sosialis atau Partai Komunis. Sedangkan kelompok menengah dan atas menjadi pendukung Partai Konservatif. Sherman & Kolkerju ga mencontohkan kecenderungan masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja di Amerika Serikat. Melalui organisasi buruh mereka cenderung menjadi pendukung Partai Demokrat

sedangkan kelas atas dan menengah menjadi pendukung Partai Republik.

Walaupun demikian, sebenarnya pembentukan rasionalisasi politik juga bergantung pada preferensi politik seseorang. Tidak terelakkan pula bahwa preferensi politik seseorang adakalanya memiliki unsur pragmatisme politik. Sebab pragmatisme politik tersebut lahir dari keyakinan seseorang akan perolehan dari aktivitas politik yang diikutinya. Jadi tidak semata-mata identifikasi kepartaian, orientasi terhadap isu dan kandidat menjadi landasan merasionalisasikan pilihan politik individu sebagaimana yang disimpulkan oleh Mashab Michigan.

Termasuk di dalamnya harus mempertimbangkan variabel preferensi dan pragmatisme politik. Variabel identifikasi kepartaian dalam pendekatan psikologis tidaklah memerlukan penilaian yang mendalam seperti menggunakan aspek kognisi politik seseorang. Kecenderungan landasan yang digunakan seseorang dalam mengidentikkan dirinya ialah aspek emosinya. Ini berbeda dengan orientasi terhadap isu dan orientasi terhadap kandidat yang jelas memerlukan kognisi politik yang tinggi.

Kognisi politik seseorang dapat bermula timbul dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Sementara, pengalaman di organisasi sosial dan politik yang ditunjang dengan pendidikan yang memadai semakin menjadikan seseorang sebagai pemilih yang rasional. Di negara-negara maju rasionalisasi pemilih terhadap pilihannya pada partai politik ditentukan oleh aspek ini. Akibatnya partai politik dituntut lebih saksama dalam memiliha isu- isu kampanye serta berusaha menepati janji setelah

memenangkan pemilihan umum.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Partisipasi politik juga, senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.¹⁷

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal.¹⁸

4. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di

¹⁷ Henri Subiakto, Rachmah Ida, “*Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012) h. 64.

¹⁸ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994) h.1.

dalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.¹⁹

Adapun bentuk-bentuk perilaku pemilih yang dimaksud disini adalah antara lain keikutsertaan masyarakat dalam kampanye, keikutsertaan masyarakat dalam partai politik dan juga puncaknya keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara (*vote*).

1. Sebagai komunikasi politik, kampanye diarahkan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan pertanggungjawaban terhadap program-program yang ditawarkan calon. Sebagai pendidikan politik, kampanye mengandung penguatan rasionalitas dan kritisisme pemilih. Dan melalui kampanye kita dapat melihat, apakah memang masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan kampanye tersebut karena dengan ikut di dalam pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bentuk dari perilaku pemilih.
2. Kegiatan seseorang dalam parpol adalah merupakan sebuah partisipasi politik. Sehingga adapun peran dan fungsi partai politik di dalam pilkada adalah : (1)sebagai komunikasi politik yaitu contohnya melaksanakan kampanye; (2)sebagai pendidikan politik yaitu memberikan pengarahan untuk ikut serta memberika suara (*vote*); (3)sosialisasi pilkada yang menjelaskan untuk apa dan mengapa diadakan pilkada; (4)fungsi rekrutmen politik.

¹⁹ Arbi Sanit, “*Partai, Pemilu dan Demokrasi*”. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997) h.170

3. Yang terakhir adalah puncaknya pada saat pemungutan suara atau vote. Disini akan dilihat seberapa besar masyarakat yang benar ikut ambil bagian dalam pemilihan tadi. Yaitu ketika mereka memberikan suara mereka di TPS lingkungan mereka masing-masing.²⁰

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat *loyalitas* pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideology sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideology yang berseberangan dengan mereka.

Di dalam mengambil keputusannya, maka masyarakat diperkirakan mempunyai tolak ukur yang tradisional yang meliputi 3

²⁰ Irtanto, "*Dinamika Politik Lokal Era otonomi Daerah*". (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) h. 178-182

aspek penting, yakni:

- Identifikasi terhadap partai
- Isu yang diusung partai atau calon, dan
- Penampilan, gaya dan kepribadian calon.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, dia disebut sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Inggris, menyebutkan model ini sebagai *social determinism approach*.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (lelaki-perempuan), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, yang merupakan sesuatu yang sangat vital dalam

memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.²¹

b. Pendekatan Psikologis

Bila pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat dan berasal dari Eropa Barat, maka pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre* di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut Mazhab Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah Angus Campbell.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya.

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis

²¹ Asfar Muhammad, "*Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 137-144

sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.²²

c. Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya.

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan

²² Asfar Muhammad, *"Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004"*. (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 137-144

pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih. Oleh karena itu, pada Pemilu 2008 sistem pemilihan diubah, dan mempersilahkan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).²²

4. Jenis-Jenis Tipe Pemilih

a. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang

kontestan pemilu.²³

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih

²³ Asfar Muhammad, "Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 144-149

jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

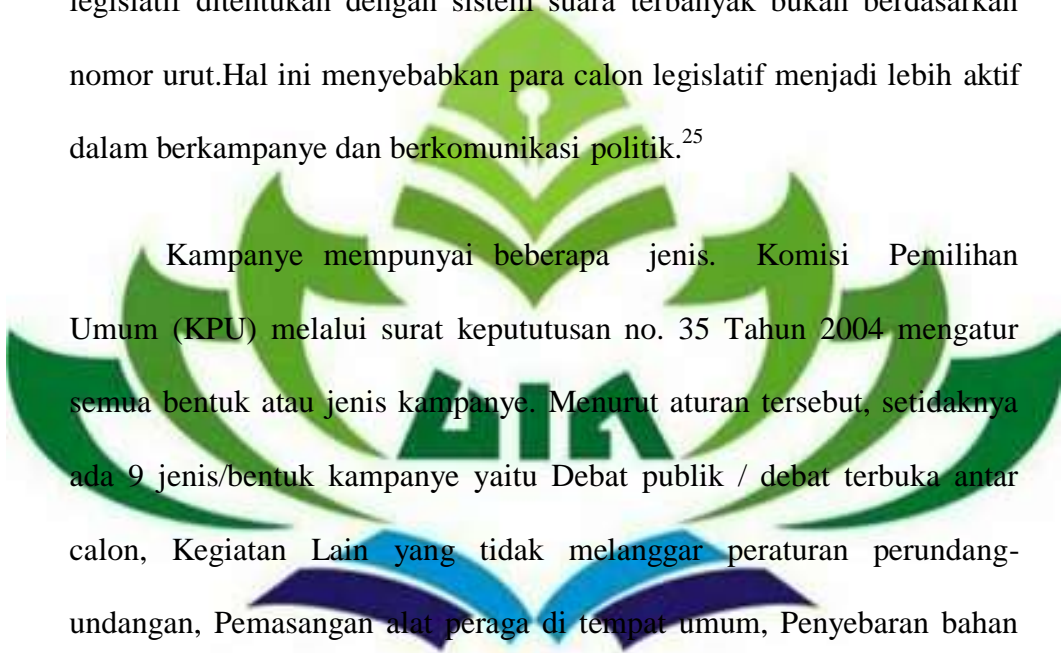
5. Kampanye Politik

Roger dan Storey memberi pengertian kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Pesan kampanye sifatnya harus terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi. Hal ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik bahkan sebagian kampanye ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum (*public interest*).

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan

secara terus menerus pada waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan banyak diterima.²⁴

Revisi UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012 berimplikasi terhadap strategi yang diusung oleh para kandidat calon legislatif. Dalam pasal 215 dinyatakan bahwa penetapan calon legislatif ditentukan dengan sistem suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut. Hal ini menyebabkan para calon legislatif menjadi lebih aktif dalam berkampanye dan berkomunikasi politik.²⁵



Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu Debat publik / debat terbuka antar calon, Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, Pemasangan alat peraga di tempat umum, Penyebaran bahan kampanye kepada umum, Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, Penyiaran melalui radio dan atau televisi, Pertemuan Terbatas, Rapat umum, dan Tatap muka dan dialog.

Strategi komunikasi kampanye yang dilakukan oleh para kandidat dalam pemilihan legislatif pada pemilu 9 Juli 2014 yang lalu, secara

²⁴Siti Fatimah, 'Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu', *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1.1 (2018),

²⁵ Wirawan Jaya, Hafied Cangara, and Universitas Hasanuddin, 'Perebutan Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Baru Periode 2014-2019', *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4.3 (2019), 239–56.

nasional dapat dikatakan mirip dan identik termasuk di Kabupaten waykanan provinsi lampung. Kegiatan itu bisa berupa penggalangan massa lewat kegiatan pengajian, sponsorship pertandingan olahraga, pendirian posko pemenangan, pembagian cendera mata maupun sembako, penggunaan media massa (iklan politik), pemasangan baliho dan spanduk serta usaha- usaha simpatik lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan diri calon legislatif kepada khalayak ramai.

Masalah kampanye hitam ini menjadi perhatian serius dari Panwaslu dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti, karena sudah menyerang dan menjatuhkan nama baik seseorang. Sebenarnya tidak terdapat suatu definisi mengenai black campaign. Istilah tersebut digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan-kegiatan yang dikenal sebagai negative campaign dalam rangka menjatuhkan lawan politik. Kegiatan negative campaign yang bisa dikatakan sebagai black campaign jika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dan menjurus pada fitnah dan hujatan.

Dahulu black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif (calon kepala daerah). Sekarang black campaign dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih,

seperti misalnya menggunakan sosial media dan komunikasi lewat gadget Namun demikian, media cetak pun masih tetap digunakan untuk media black campaign ini.

5. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemilu merupakan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat.²⁶ Secara konseptual pemilu menurut Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁷

Pemilihan umum secara teknik oprasional menurut para ahli diungkapkan oleh Umarudi Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknik pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara dari rkyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat dan secara luas lagi pemilu, menurut Adrew Reynold menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang

²⁶ Dr. Muhadam Labalo dan Teguh Ilham, S. Stp, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGafindo Persada, 2015, h.49

²⁷ Saiful Mujani, William Liddle, Kuskrido ambardi. 2011. *Kuasa rakyat, analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislative dan presiden Indonesia pasca-orde baru*. Jakarta: Mizan publika

diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.²⁸

Secara umum pemilu merupakan proses pemberian suara dari rakyat melalui pencoblosan secara langsung dimana suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh kandidat yang menjadi penyambung lidah rakyat untuk pembuatan kebijakan Negara.

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

a. Fungsi Pemilihan Umum

Adapun fungsi pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain:

1) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung, Kekuasaan merupakan hal yang sangat mempesona, karena mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perebutan dan kompetisi dan tak banyak pemburu kekuasaan cenderung menghalalkan cara untuk mencapainya. Pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab.²⁹

2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah,

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat

²⁸ Efriza. 2012. *Political Explore, Sebuah kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta

²⁹ Riswandha Imawan. Dalam Suryana Aminudin. *Perilaku Politik di Indonesia. (Jurnal Aspirasi Vol 1. No.2 Februari 2011. Indramayu. Visip Unwir)*

publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerjanya dengan baik selama memerintah maka dengan ajang pemilu pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilih calon atau partai politik yang sedang memerintah saat ini. Begitu sebaiknya jika pemerintah saat ini dirasa baik dalam memainkan roda pemerintahannya kemungkinan besar para pemilih masyarakat akan memilih kembali calon atau partai politik yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahannya.³⁰

3). Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka biasa kita mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari perolehan suara apakah mereka memenangkan dengan suara mutlak atau selisih suara. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.³¹

4) Sarana Rekrutmen politik, Menurut Cholisin rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya

³⁰ Setyaningrum, Arie. 2005 Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial. *Jurnal Mandatory politik Perlawanan*. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005

³¹ Roth, Dieter. 2009. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.

- 5) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat, Sebelum melakukan pemilu, tentu para calon kandidat akan melakukan kampanye politik. Dalam masa kampanye calon akan menyampaikan visi, misalnya yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

b. Tujuan Pemilihan umum

Adapun tujuan pelaksanaan pemilu menurut Ramlan Subakti menyebutkan ada tiga yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum (Public policy) dalam demokrasi. Bahwa rakyat yang berdaulat tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan penyeleksian dan pendegelasan atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh pemerintah biasanya menyangkut hal yang prinsipil beberapa Negara menyelenggaraan pemilihan umum sebagai umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum.

- ii. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.³²
- iii. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.³³

Adapun menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Khairul Fahmi, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan,
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.³⁴

3. Asas Pemilihan Umum

Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pada bab II asas, prinsip dan tujuan pada pasal 2 mengenai pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

³² Solihah Ratna. Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif politik. (*Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, No. 1, 2018,73-88 Universitas Padjajaran).

³³ Hanan , D.9(2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, 1451-1475.

³⁴ Moento, P., Fitmeriani, F., & Maturan, A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(2), 109-121.

- 
- a. Langsung, Artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
 - b. Umum, Berarti pemilu berlaku bagi semua warga Negara yang memenuhi syarat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, maupun status social lainnya.
 - c. Bebas, Artinya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan untuk pemilihan dalam pemilu bebas memilih siapa pun yang akan dipilih menurut hati nuraninya sebagai pengemban aspirasinya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
 - d. Rahasia, artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri ketika memilih dibalik suara.
 - e. Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilih maupun peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan sesuatu apapun dan bebas dari kecurangan pihak manapun.
4. Tahapan –Tahapan pelaksanaan Pemilu
- a. Penyusunan daftar pemilih.
 - b. Pendaftaran peserta pemilu.

- c. Penetapan peserta pemilu.
- d. Masa kampanye.
- e. Masa tenang.
- f. Pemungutan dan penghitungan suara.
- g. Penetapan hasil pemilu.³⁵

5. Aturan-aturan dalam Pelaksanaan Pemilu

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada BAB II tentang asas, prinsip dan tujuan pada pasal 2 yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif dan eVisien.
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Ayat 1 yaitu pelaksana, peserta, dan tim Kampanye pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar Negara pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/peserta pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat;

³⁵ Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas(Pemilu legislative), (Jakarta: PT GafindroPersada, 2009), h.158

- e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok, anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.
- k. PKPU No Tahun 2017
1. Pasal 2 mengenai penyelenggaraan pemilu berpedoman pada:
- a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Kepentingan umum
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntabilitas

- k. EVisiensi
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas.

2. Pasal 4 ayat 1 yaitu kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Jujur
- b. Terbuka
- c. Dialogis

6. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tugas dan wewenang masing-masing lembaga penyelenggaraan pemilu tersebut sebagaimana dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, pada pasal 73 adalah sebagai berikut.³⁶

a. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Beberapa Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu yaitu:

- 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan program
- 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), kelompok penyelenggara

³⁶ Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h.9

pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap pemilu.
4. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu.
5. Menerima daftar pemilu dari KPU provinsi.
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan.
7. Menetapkan peserta pemilu.
8. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia(Bawaslu RI) Kewenangan dan tugas bawaslu adalah sebagai berikut.³⁷

³⁷ Riyoan Ananias Philip Jacob. *Preferensi Masyarakat Etnis Timor Salam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kota Kupang Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN 2442-6962 Vol 6 No. 1(2017) Malang Visip Untribhuwana

1. Bawaslu menyusun standard tata plaksana kerja pengawasa tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja pengawas pemilu di setiap tingktan.
 2. Bawaslu bertugas mngawsi dan penindakan penyelenggaraan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis
 3. Tugas bawaslu sebagaimana dimaksudkan paa ayat(2) meliputi:
 - a) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
 - b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelnggaraan pemilu
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bawaslu berwenang.
 - a) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran admistrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang,
 - b) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran admistrasi pemilu dan sengketa pemilu
- c. Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum Republik Indonesia (DKPP RI)
- DKKP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik. Tujuannya adalah agar kualitas penyelenggaraan pemilu semakin tertata dengan baik.³⁸

³⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

6. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan terkait dengan preferensi masyarakat dalam memilih prbowo terhadap pelaksanaan pilpres 2019 sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul” Preferensi Masyarakat Terhadap Pemenangan Pemilhan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan” yang ditulis oleh Dian Fentika Sari Jurusan Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian ini menggunakan persepsi tokoh masyarakat serta masyarakat kabupaten Lampung Selatan sedangkan penulis menggnakan prefersensi masyarakat Kabupaten Gunung Labuhan Kecamatan Way Kanan untuk melihat pelaksanaan pilpres 2019 hal yang membedakan lainnya pada penelitian sebelumnya persepsi masyarakat terhadap kemenangan calon namun pada penelitian ini penulis mengarah pada preferensi masyarakat dalam memilih prabowo pada pemilu presiden yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu.³⁹
2. Penelitian yang berjudul” Persepsi masyarakat terhadap peranan partai politik dalam pemilihan kepala daerah Didesa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015” yang ditulis oleh Anna Dameira Turnip Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universits Lampung. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan dalam

³⁹ Dian Fentika Sari, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan* ”, (Skripsi Program Strata satu Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018)

penelitian ini dengan penulis adalah menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan persepsi, namun adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah tempat penelitian dan variable terikatnya penulis ingin melihat pelaksanaan pilpres 2019 sedangkan peneliti terdahulu melihat pandangan masyarakat terkait peranan partai politik dalam pilkada 2015.⁴⁰

3. Penelitian yang berjudul "Persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak di desaway mili kecamatan gunung pelindung kabupaten lampung timur tahun 2016", yang ditulis oleh Fitra Endi Fernanda Jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial fakultas keguruan da ilmu pendidikan Universitas Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pemilih pemula terhadap pilkada serentak adalah 58,92% dengan kategori cenderung tidak paham dari 56 responden yang diteliti, adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, objek yang diteliti, serta tempat penelitian.⁴¹

⁴⁰ Anna Dameria Turip, "Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Didesa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015", (Skripsi Program Strata Satu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016)

⁴¹ Fitra Endi Fernanda, "Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Didesa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016", (Skripsi Program Strata Satu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016)

DAPSTAR PUSTAKA

Sumber Buku

A.Mukhtie Fadjar, *Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan Demokrasi, Setara Press*, Jawa Tmur, 2013

Abdullah, Rozali, *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislative)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017/2018.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta:PT Raja GRafindo, 2011

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017

Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Prenhanllindo, 2002

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Prenhanllindo, 2002

Irwan Suhartono, 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta :PT adi mahsatya.

Kalean, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005

Labalo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2015

M, Janedri Gaffar , *Demokrasi Dan Pemilu DiIndonesia*, Jakarta: Konstitusi press, 2013

Puspita, Weni, *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbit CV Budi Utama), 2018

Rahmad, Jalahuddin, *Psikologi Komunikasi*, :Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revolusi, 2001

Saldi Isra, dkk, *Pemilihan Umum Serentak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV alfabeta, 2012

Tony & Barry Buza. N, 2004. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, Jakarta: Interaksara.

Sumber Jurnal

Aditya Perdana dan Delia Wildianti, 'Narasi Kampanye Dan Media Sosial Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019', *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 2019

Ahmad Budiman, Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014, *Jurnal Wacana*, vol. VIII, No. II, 2014

Ali Yusri dan Adlin, Pengaruh Kampanye Negatif dan kampanye Hitam, Terhadap Pilihan Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011, *Karya Tulis Ilmiah*, 2011.

Aulia, Kampanye Hitam Dalam Pemilu Melalui Media Massa, *Rechtidee Journal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014.

Budi Suliistiyo dan Sri Suwartiningsih, 'Peran Media Massa Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014', *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXV 1 (2016), 10-26

Efriza, Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019', *Jurnal Penelitian Politik* Vol.16, No.1, Juni 2019, Hal. 1-5

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung Pt Remaja Rosda Karya, 2017), h. 6.

- Nuryanti, ' Peranan Media Massa Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4.3 (2018), 1179-90 <https://media.neliti.com/media/publications/127889-ID-Peran-media-massa-saat-pemilihan-umum-me.pdf>
- Piroza, Eki, ' Kampanye Pemilu Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam SKH Kedaulatan Rakyat', *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarnegaraan*, 4.2 (2015), 111-22 <https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i2.6270>
- R. Siti Zuhro,'Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019', *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 16, No. 1, Juni 2019, Hal. 69-81
- Rafika Nuari dan Bernika Yustisiana, 'Pengaruh Kampanye Capres-Cawapres Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Mahasiswa VISIP UI)', *Jurnal Depaertemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*, 2015
- Rohim, Mulkanur, and Amika Wardana, 'Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA terhadap Dinamika Politik Pada Pemilu 2019 Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4. 1 (2019), 47 <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1212>
- Sarbain, Hapani Matnuh dan Zainal, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala' , *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan*, 5.9 (2015), 735-42
- Satria Aji Setiawa dan Nova Puspitasari, 'Preferensi Struktur Organisasi Bagi Generasi Milenial' , *Jurnal Borneo Administrator*, 14.2 (2018), 101-18 <https://doi.org/10.24258/jba.v14i2.336>
- Sumarsono Soermardjo, 'Peran Televisi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 (Kasusu Di Desa Landungsari Malang)', *Jurnal Penelitian Dan pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5.3 (2015), 45-55
- Wasisto Raharjo Jati, 'Politik Persuasif Media: Peran Media Masa Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2019' , *Jurnal Penelitian Politik*, 10 .2 (2013), 5-8 <<https://doi.org/10.1111/blr.12366>>